

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1769/DJU/SK/KP.04.5/9/2021

TENTANG

**PROMOSI DAN MUTASI KETUA, WAKIL KETUA DAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I tanggal **08 September 2021**;
- c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA : Kepadanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT:

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara kecuali nomor urut 14, 30, 38, 53, 64, 71, 89, 107, 113, 115, 120, 122, 132, 134, 139, 152, 186, 187, 190, 192, 194, 199, 202, 206, 215, 218, 220, 221, 228, 240, 249, 256, 259, 270, 290, 295, 298, 309, 345, 352, 353, 355 dan 359.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **14 September 2021**

a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan.**
6. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan.**